



# Menakar Kelayakan Desain Penelitian Studi Kasus untuk Analisis Kebijakan

## *Assessing the Feasibility of Case Study Research Designs for Policy Analysis*

Received:

30 December 2024

Accepted:

20 June 2025

Published online:

30 June 2025



\*Prasetyo<sup>1</sup>, Melinda Trisnawati<sup>1</sup>, Antun Mardiyanta<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

\*Correspondence email: [prasetyo-2024@fisip.unair.ac.id](mailto:prasetyo-2024@fisip.unair.ac.id)

### Abstract

*As a research design, case studies have received a lot of criticism from practitioners. The most substantial criticism is the high potential for bias and its ability to generalize research findings. When associated with policy analysis, both things will have a major impact on the policy recommendations that will be produced. As is commonly known, effective, efficient, and applicable policies are the most important part in overcoming public problems. Therefore, choosing the right method in policy analysis is absolutely necessary to produce qualified policy recommendations. This article uses a literature study method to reveal the advantages, disadvantages, and opportunities for case studies to be used as a research design in policy analysis. Despite the criticism, the advantages of case study research design in providing in-depth and contextual insights and its flexibility in using data collection methods make it a valuable tool in policy analysis. With a careful approach and proper validation, case studies can make a significant contribution to the development of evidence-based policies.*

*Keywords: bias, case study, generalization, public policy analysis, public policy*

### Abstrak

Sebagai sebuah desain penelitian, studi kasus banyak mendapat kritikan dari para praktisi. Kritikan yang paling substansial adalah tingginya potensi bias dan kemampuannya dalam menggeneralisasi temuan penelitian. Jika dikaitkan dengan analisis kebijakan, kedua hal tersebut akan memiliki dampak yang besar terhadap rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan. Sebagaimana diketahui oleh umum, kebijakan yang efektif, efisien, dan aplikatif merupakan bagian paling penting dalam mengatasi permasalahan publik. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat dalam analisis kebijakan mutlak diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengungkap kelebihan, kekurangan, dan peluang studi kasus untuk dijadikan desain penelitian dalam analisis kebijakan. Meskipun terdapat kritikan, keunggulan desain penelitian studi kasus dalam memberikan wawasan mendalam dan kontekstual serta fleksibilitasnya dalam menggunakan metode pengumpulan data menjadikannya alat yang berharga dalam analisis kebijakan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan validasi yang tepat, studi kasus dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang berbasis bukti.

Kata kunci: analisis kebijakan publik, bias, generalisasi, kebijakan publik, studi kasus

## Pendahuluan

Dalam analisis kebijakan, desain penelitian menjadi fondasi yang penting untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan relevansi hasil penelitian guna mendukung pengembangan kebijakan yang efektif, efisien, dan aplikatif. Sehubungan dengan hal tersebut, metode kuantitatif dianggap lebih dapat diandalkan, valid, objektif, serta mampu digeneralisasi di berbagai konteks yang berbeda. Sebaliknya, desain penelitian studi kasus kualitatif sering kali dipertanyakan kemampuannya dalam memberikan generalisasi atau kontribusi teoretis yang lebih luas (Gomm et al., 2011). Selain itu, validitas temuan studi kasus sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama dalam konteks analisis kebijakan yang membutuhkan bukti kuat untuk mendukung rekomendasi atau keputusan tertentu. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Macpherson et al. (2010), desain penelitian ini sangat rentan terhadap kritik dari kaum positivistik, ekonom neoklasik, dan para pembuat kebijakan yang menuntut penjelasan umum tentang fenomena sosial dan klaim prediktif mengenai tindakan dan perilaku.

Dalam konteks kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), kebutuhan terhadap pendekatan penelitian yang mampu menangkap dinamika kontekstual menjadi semakin penting. Studi kasus menawarkan keunggulan dalam mengeksplorasi fenomena sosial-politik yang kompleks dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata (Sibbald et al., 2021; Sirous, 2024). Oleh karena itu, perlu evaluasi ulang terhadap persepsi inferioritas studi kasus dalam diskursus metodologis kebijakan publik kontemporer. Meskipun terdapat banyak literatur yang membahas studi kasus dalam konteks penelitian sosial, kajian yang secara khusus mengulas kelayakannya sebagai desain penelitian utama dalam analisis kebijakan publik masih terbatas. Minimnya pembahasan yang mengintegrasikan tinjauan konseptual dan pertimbangan praktis dari perspektif kebijakan menjadikan topik ini penting untuk ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menilai kelayakan studi kasus secara metodologis, tetapi juga berupaya menyajikan kerangka berpikir yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik analisis kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan reflektif terhadap dinamika lapangan.

Fokus artikel ini adalah untuk menggali argumen yang kuat dan masuk akal dalam menjawab pertanyaan tentang kelayakan desain penelitian studi kasus untuk diterapkan dalam analisis kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berbasis literatur berupa buku dan artikel yang relevan, artikel ini akan membahas diskursus mengenai definisi studi kasus menurut para praktisi, karakteristik desain penelitian ini dan kritik-kritik yang ditujukan terhadapnya, gambaran tentang analisis kebijakan, serta apakah studi kasus cocok dijadikan desain penelitian dalam analisis kebijakan. Dengan mengeksplorasi kelebihan, kekurangan, serta tantangan yang melekat pada desain penelitian studi kasus, artikel ini berupaya memberikan panduan bagi para peneliti dan pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan studi kasus sebagai desain penelitian analisis kebijakan. Pada

akhirnya, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai relevansi dan penerapan desain penelitian studi kasus dalam menghasilkan analisis kebijakan yang berbasis bukti sehingga dapat mendorong pengembangan kebijakan yang efektif, efisien, dan aplikatif.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal, buku, dan artikel dari peneliti terdahulu yang relevan dengan objek penelitian serta berbagai sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan penelitian (Adlini et al., 2022). Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk merumuskan argumen secara konseptual berdasarkan kajian mendalam terhadap literatur yang relevan dengan diskursus metodologis studi kasus dalam kebijakan publik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, dengan sumber utama berupa buku dan artikel penelitian terdahulu.

Literatur yang dianalisis dalam studi ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi tematik, kelengkapan metodologis, serta publikasi ilmiah terkini (terutama terbitan tahun 2010 ke atas), baik yang bersumber dari jurnal nasional maupun jurnal internasional terindeks. Literatur dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dalam diskursus studi kasus sebagai desain penelitian kebijakan. Proses analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mengevaluasi literatur ke dalam empat tema utama: (1) konsep dan perkembangan desain studi kasus, (2) keunggulan dan kontroversi metodologis studi kasus, (3) relevansi studi kasus dalam proses analisis kebijakan publik, dan (4) studi kasus untuk analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan struktur argumentatif yang sistematis dan mendalam terhadap kelayakan studi kasus dalam ranah kebijakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep dan Perkembangan Desain Studi Kasus**

Para ahli memiliki beragam perspektif dan pendapat dalam mendefinisikan apa itu studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk investigasi yang intensif dan mendalam terhadap satu unit kasus atau fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Dempsey & Dempsey; Langford dalam Luck et al., 2006). Glette dan Wiig (2022) mendefinisikan studi kasus sebagai metode yang digunakan untuk menyelidiki satu atau lebih kasus dalam batas area tertentu secara komprehensif, dengan tujuan mengidentifikasi keunikan, kompleksitas, maupun kesamaannya, serta mencapai pemahaman mendalam mengenai konteks tersebut. Definisi ini selaras dengan pendekatan dari Crowe et al. (2011) yang menekankan pemahaman kontekstual secara mendalam melalui berbagai teknik eksplorasi.

Namun, jika studi kasus digambarkan sebagai sebuah metode, para praktisi tidak menentukan teknik pengumpulan data tertentu selain tidak disyaratkannya penggunaan analisis statistik (Thomas, 2016; Yin, 2018).

Runyan dalam Stoecker (1991) mendefinisikan studi kasus klinis dalam psikiatri bukan sebagai metode, melainkan suatu bentuk pengorganisasian dan penyajian informasi tentang orang tertentu dan keadaannya, yang dapat memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikonsepsikan Wolcott dalam Macpherson et al. (2010), bahwa studi kasus sebagai sebuah hasil atau format untuk melaporkan pekerjaan kualitatif/ deskriptif. Jika dipahami demikian, maka studi kasus lebih mencerminkan representasi naratif daripada desain penelitian yang sistematis, dan temuan yang dihasilkan sering kali dianggap kurang aplikatif dalam pengembangan teori atau kebijakan (Macpherson et al., 2010; Flyvbjerg, 2006).

Yin (2018) memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu studi kasus sebagai penyelidikan empiris terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas, serta melibatkan penggunaan berbagai sumber bukti. Namun, pada praktiknya, fenomena yang sudah berlalu juga dapat diterima pada penelitian studi kasus (Stoecker, 1991). Pandangan lain tentang studi kasus adalah bahwa studi kasus lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah desain penelitian, bukan sebuah metode (Platt dalam Stoecker, 1991; Hyett et al., 2014; Creswell & Poth, 2018). Desain penelitian dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang lebih spesifik mengenai strategi, penyelidikan, atau prosedur dalam melakukan penelitian kualitatif, yang mampu menangkap dinamika sosial secara mendalam dan kontekstual (Creswell & Creswell, 2018). Dari beberapa definisi tersebut, dapat dilihat satu benang merah yaitu bahwa studi kasus bersifat spesifik, kontekstual, inilah yang membedakannya dengan desain penelitian lain.

Desain penelitian studi kasus memiliki riwayat yang panjang dalam sejarah penelitian dan ilmu sosial. Pada awal 1900-an, para pemilik bisnis di Amerika Serikat menyubsidi penelitian akademis untuk memecahkan masalah mereka, dan para akademisi mempraktikkan penelitian studi kasus dan metode pengajaran di lingkungan bergengsi seperti Harvard Business School karena kebutuhan akan penelitian terapan dan kekurangan dari teori administratif serta teknik penelitian kuantitatif (Subramaniam dalam Stoecker, 1991). Dalam bidang sosiologi, pendekatan studi kasus berkembang pesat selama tahun 1920-an dan 1930-an (Platt dalam Stoecker, 1991). Namun, pada tahun 1950-an, studi kasus mulai ditinggalkan di banyak disiplin karena dianggap tidak cukup kuat dalam membangun generalisasi teoretis. Para sosiolog menilai studi kasus hanya sebagai metode eksplorasi awal (Platt dalam Stoecker, 1991).

Indeks American Journal of Sociology tahun 1950 pernah mencantumkan enam belas referensi terkait studi kasus, tetapi setahun kemudian judul-judul menghilang dari publikasi (Mitchell

dalam Stoecker, 1991). Studi kasus selanjutnya tidak muncul lagi dalam diskusi-diskusi tersebut setelah tahun 1970-an meskipun masih digunakan dalam psikologi klinis, antropologi, dan geografi. (Platt et al., dalam Stoecker, 1991). Di era kontemporer, desain studi kasus telah berevolusi menjadi pendekatan yang lebih canggih, multidisipliner, dan relevan (Gerring, 2017; Hyett et al., 2014; Flyvbjerg, 2006). Dengan dukungan teknologi, diversifikasi penggunaannya, dan inovasi metodologis, studi kasus kembali menjadi alat penting untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata.

### Keunggulan dan Kontroversi Metodologis Studi Kasus

Desain penelitian studi kasus menawarkan sebuah fleksibilitas yang dapat dikatakan sebagai kekuatan utamanya dibandingkan dengan desain penelitian lain. Desain ini dapat menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mengeksplorasi atau memahami kasus (Creswell & Poth, 2018). Dalam desain penelitian studi kasus, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu studi kasus diklaim dapat mendorong integrasi strategi penelitian (Marshall & Rossman, 2016; Jones & Lyons dalam Luck et al., 2006; Thomas, 2016). Hal ini sekaligus juga memungkinkan adanya triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. McDonnell, Myfanwy dan Read dalam Luck et al., (2006) menggabungkan tiga pendekatan metodologis yang berbeda dalam kerangka desain studi kasus dan berpendapat bahwa perbedaan ini dipandang sebagai kekuatan metodologis yang dimiliki desain penelitian studi kasus. Pandangan tersebut menegaskan bahwa studi kasus relevan dan berpotensi kompatibel dengan berbagai epistemologi yang berbeda (Takahasi dan Araujo, 2020). Karena kelebihan ini pula, Sibbald et al. (2021) mengemukakan jika studi kasus merupakan pendekatan yang sangat cocok digunakan untuk penelitian *mixed methods*.

Karakteristik lain dari desain penelitian studi kasus adalah digunakan untuk memahami fenomena kontekstual tentang individu, kelompok, organisasi, lembaga, peristiwa sosial, atau politik (Langford dalam Luck et al., 2006; Yin, 2018; Sirous, 2024; Glette & Wiig, 2022). Hal tersebut berarti studi kasus dilakukan dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks yang dicirikan oleh peristiwa, estetika, dimensi fisik, perayaan, dan politik (Stake dalam Luck et al., 2006), yang semuanya berada dalam ruang dan waktu. Kontekstual berperan penting untuk memahami kompleksitas fenomena dan membantu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel. Studi kasus bahkan diklaim dapat menganalisis sebab akibat secara lebih efektif dibandingkan penelitian kuantitatif *cross-sectional* karena studi kasus memiliki kemampuan untuk menjelaskan idiosinkratik yang membentuk *unexplained variance* yang tidak dapat diungkap oleh analisis statistik (Stoecker, 1991).

Karena karakternya yang lebih menekankan pada hal-hal spesifik dalam konteks unik, studi kasus sering kali menjadi dasar pengembangan teori baru atau penyesuaian teori yang ada. W.I.B. Beveridge dalam Flyvbjerg (2006) mengamati jika lebih banyak penemuan yang muncul dari pengamatan yang intens daripada dari statistik yang diterapkan pada kelompok besar). Karl Popper dalam Flyvbjerg (2006) memberikan perspektif lain tentang generalisasi studi kasus dan perannya dalam pengembangan teori dengan menggunakan jenis pengujian yang disebut sebagai "*falsifikasi*", yang dalam ilmu sosial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan kritis. Falsifikasi adalah proses menguji hipotesis atau teori dengan mencari bukti yang dapat menyangkalnya. Jika ditemukan satu saja bukti ketidaksesuaian, maka sebuah teori dianggap tidak valid. Dalam metode ilmiah, falsifikasi dianggap sebagai salah satu tes paling ketat untuk menguji validitas klaim ilmiah (Flyvbjerg, 2006).

Anggapan negatif tentang kemampuan generalisasi desain penelitian studi kasus memunculkan anggapan lain bahwa studi kasus hanya berguna untuk menghasilkan hipotesis pada langkah pertama dari keseluruhan proses penelitian, sedangkan pengujian hipotesis dan pengembangan teori lebih baik dilakukan dengan metode lain (Flyvbjerg, 2006). Sebaliknya, Eckstein dalam Flyvbjerg (2006) mengklaim bahwa studi kasus lebih baik untuk menguji hipotesis daripada menghasilkan hipotesis. Menurutnya, studi kasus sangat berharga pada semua tahap proses pembangunan teori, tetapi paling berharga pada tahap pembangunan teori dimana teori-teori yang sudah ada diuji.

Tentu saja, ada potensi ketidakpastian yang melekat dalam penelitian studi kasus seperti halnya penelitian kualitatif lain, karena kekayaan data menawarkan banyak tantangan untuk interpretasi induktif dibandingkan dengan proses deduktif yang hanya menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dalam penelitian kuantitatif. Studi kasus banyak mendapatkan kritikan keras dari para peneliti, salah satu yang paling terkenal adalah kritik yang disampaikan Campbell, walaupun di kemudian hari Campbell mengubah pandangannya dan menjadi pendukung desain penelitian ini.

*Studi semacam itu tidak memiliki kontrol sama sekali sehingga hampir tidak memiliki nilai ilmiah. Setiap penampilan pengetahuan absolut, atau pengetahuan intrinsik tentang objek tunggal yang terisolasi, ditemukan sebagai ilusi setelah dianalisis. Tampaknya hampir tidak etis pada saat ini untuk mengizinkan, sebagai tesis atau disertasi dalam bidang pendidikan, studi kasus semacam ini (melibatkan satu kelompok yang diamati pada satu waktu saja). (Campbell & Stanley dalam Flyvbjerg, 2006)*

Masalah yang sering disampaikan para kritikus pada desain penelitian studi kasus adalah ancaman bias. Kritikan ini terjadi karena anggapan kurang ketatnya penelitian studi kasus dibandingkan dengan metode kuantitatif dan metode deduktif-hipotetik (Flyvbjerg, 2006). Anggapan tersebut sering dikaitkan dengan fleksibilitas yang menjadi karakter penelitian studi kasus (Sibbald et al, 2021). Peneliti studi kasus juga sering kali dianggap mengakomodir bukti yang 'samar-samar' atau pandangan yang bias, yang mana pada akhirnya akan berpengaruh pada arah temuan dan

kesimpulan yang dihasilkan. Bromley dalam Stoecker (1991) menegaskan bahwa banyak kritikus mengkhawatirkan pengaruh peneliti dalam desain studi kasus (bias subjektivitas). Sementara Becker dalam Stoecker (1991) mengaitkan bias dalam desain penelitian studi kasus dengan kemungkinan para peneliti yang tidak bersikap netral terhadap subjek yang mereka teliti. Kekhawatiran tentang kecenderungan untuk mengkonfirmasi gagasan yang sudah ada dalam benak peneliti digambarkan oleh Diamond sebagai “kelemahan yang melumpuhkan” karena tidak menerapkan metode ilmiah yang menurutnya berguna untuk membatasi kecenderungan peneliti untuk membenarkan interpretasi yang sudah mereka pikirkan sebelumnya pada data yang dikumpulkan (Flyvbjerg, 2006). Bias dalam desain penelitian studi kasus juga bisa terjadi ketika pemilihan kasus tidak representatif terhadap populasi yang lebih luas, sehingga hasil penelitian sulit digeneralisasikan (bias seleksi).

Satu hal yang sering dilupakan para kritikus studi kasus adalah bahwa bias juga dapat masuk ke dalam strategi – strategi penelitian yang lain, seperti dalam mendesain kuesioner untuk survei dan penyelenggaraan eksperimen (Rosenthal et al. dalam Yin, 2018). Perbedaannya ialah dalam penelitian studi kasus hal tersebut jarang didokumentasikan dan diungkapkan. Masalah bias sebenarnya adalah hal yang umum, tetapi studi kasus dan metode kualitatif lainnya dianggap seolah-olah memberikan lebih banyak kelonggaran untuk penilaian subjektif dan sewenang-wenang dari peneliti daripada metode lainnya dibandingkan dengan metode kuantitatif dan metode deduktif-hipotetik. Francis Bacon bahkan melihat bias sebagai karakteristik dasar manusia.

*Pemahaman manusia dari sifatnya yang khas, dengan mudah mengandaikan tingkat keteraturan dan kesetaraan yang lebih besar dalam berbagai hal daripada yang sebenarnya ditemukannya. Ketika sebuah proposisi telah ditetapkan, pemahaman manusia memaksa segala sesuatu yang lain untuk menambahkan dukungan dan konfirmasi baru. Ini adalah kesalahan yang khas dan abadi dari pemahaman manusia untuk lebih tergerak dan bersemangat oleh afirmatif daripada negatif. (Bacon dalam Flyvbjerg, 2006)*

Campbell dan yang lainnya juga telah menunjukkan bahwa kritik “studi kasus rawan bias” adalah keliru karena studi kasus memiliki ketelitiannya sendiri. Hal ini yang berbeda tetapi tidak kalah ketat dengan ketelitian metode kuantitatif. Kelebihan dari penelitian studi kasus adalah bahwa studi kasus memiliki relevansi yang tinggi pada situasi kehidupan nyata dan menguji pandangan secara langsung dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di lapangan (Flyvbjerg, 2006).

Kritik kedua terkait dengan keterbatasan generalisasi. Hasil penelitian studi kasus dianggap tidak memungkinkan untuk digeneralisasikan pada lingkungan lain (Smith & Robbins; Berger, dalam Stoecker, 1991) karena studi kasus biasanya fokus pada unit analisis tertentu dalam konteks spesifik. Berkaitan dengan persoalan generalisasi, Yin (2018) menyarankan kepada para kritikus studi kasus untuk menanyakan hal serupa pada pendekatan lain, seperti eksperimen. Hal yang perlu digarisbawahi adalah penelitian studi kasus telah memainkan peran penting ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu sosial. Studi kasus telah menjangkau banyak bidang, seperti astronomi, geologi, dan

biologi. Sebagai contoh, teori evolusi Darwin yang ditemukan berdasarkan pada penelitian studi kasus, bukan eksperimen atau pendekatan penelitian lain. Sejalan dengan ini, muncul pandangan bahwa sampel probabilitas dan uji signifikansi statistik tidak menjamin penjelasan yang valid maupun generalisasi yang valid (Stoecker, 1991).

Mitchell berpendapat bahwa kesimpulan tentang hubungan antara dua karakteristik tidak didasarkan pada representasi sampel tetapi lebih pada kelogisan hubungan antara dua karakteristik (Stoecker, 1991). Yin (2018) mengemukakan, generalisasi pada penelitian studi kasus mungkin untuk dilakukan tetapi tidak sama dengan cara generalisasi statistik. Lebih lanjut, Yin (2018) menjelaskan jika studi kasus dan eksperimen bertujuan mengembangkan dan menggeneralisasikan teori (generalisasi analitis) dan bukan menghitung frekuensi (generalisasi statistik). Dalam generalisasi analitis, hasil studi kasus tidak digeneralisasikan langsung ke populasi, seperti dalam pendekatan kuantitatif (*generalization to the population*). Sebaliknya, hasil studi kasus dibandingkan dengan teori-teori yang relevan atau temuan penelitian lain untuk melihat sejauh mana hasil tersebut mendukung, memperluas, atau menantang teori-teori yang ada.

Berbeda dengan Yin (2018), ada peneliti seperti Stake dalam Macpherson et al. (2010) yang percaya bahwa tujuan penelitian studi kasus adalah “partikularisasi, bukan generalisasi”, dan Thomas (2016), yang menolak konsep generalisasi teoretis dalam penelitian studi kasus, dan sebaliknya percaya bahwa “tujuan dari usaha ilmu sosial, khususnya dalam studi kasus, haruslah pengetahuan yang patut dicontoh, yang dapat berasal dari kasus, bukan dari generalisasinya” (Reller & Ravrakas, 2015). Thomas (2016) melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa hanya mencoba menggeneralisasi data studi kasus akan memiliki efek yang merugikan yaitu meredam keingintahuan dan interpretasi peneliti terhadap hasilnya.

Selain itu, desain penelitian studi kasus sering kali mendapatkan kritikan karena dianggap kurang efisien. Penelitian studi kasus sering kali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar karena pengumpulan data yang mendalam dan analisis kompleks. Karena hal itu pula, studi kasus dinilai menghasilkan dokumen yang terlalu tebal sehingga melelahkan untuk dibaca (Yin, 2018). Para peneliti studi kasus menanggapi, narasi yang tebal dan sulit untuk diringkas merupakan tanda bahwa penelitian tersebut telah menemukan masalah yang sangat kaya. Studi kasus menghasilkan narasi yang sarat akan substansi, mendekati kompleksitas dan kontradiksi dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, narasi semacam itu mungkin sulit atau tidak mungkin untuk diringkas ke dalam formula ilmiah yang rapi, proposisi umum, dan teori (Benhabib, Mitchell, dan Charmaz et al. dalam Flyvbjerg, 2006). Lisa Peattie secara eksplisit memperingatkan agar tidak meringkas studi kasus yang padat (Flyvbjerg, 2006).

*Hal ini karena nilai dari studi kasus, sifat kontekstual dan interpenetrasi dari kekuatan-kekuatan, akan hilang ketika seseorang mencoba untuk meringkas*

*dalam konsep-konsep yang besar dan saling terpisah (Peattie dalam Flyvbjerg, 2006)*

Dibalik kebutuhan akan waktu dan biaya yang besar serta dokumen penelitian yang tebal, studi kasus memberikan wawasan mendalam yang sulit dicapai oleh metode lain, terutama untuk fenomena yang kompleks dan kontekstual. Dengan desain penelitian yang matang, seperti yang disampaikan oleh Yin (2018), studi kasus dapat dirancang secara efisien untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya.

### Relevansi Studi Kasus dalam Proses Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Lasswell dalam Dunn, 2020), sedangkan kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan isu atau masalah yang berkembang di masyarakat. Dye dalam Prasetyia & Pangestuty (2021). menggambarkan kebijakan publik sebagai sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam hal menanggapi isu yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Cochran dan Malone dalam Prasetyia & Pangestuty (2021) memberikan definisi yang lebih sempit dengan mengartikan kebijakan publik sebagai kumpulan dari berbagai keputusan politik untuk mengimplementasikan program yang disepakati dalam mencapai tujuan masyarakat. Namun, menurut Peters, kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mengacu pada keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat (Prasetyia & Pangestuty, 2021).

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah publik. Dye (dalam Prasetyia & Pangestuty, 2021) menjelaskan alasan mengapa kebijakan publik dianggap penting adalah karena merupakan salah satu pertimbangan ilmiah terhadap isu-isu publik. Oleh karena itu, kebijakan publik memerlukan kajian terhadap asal masalah, proses, perkembangan masalah, dan efeknya terhadap masyarakat. Alasan kedua adalah bahwa kebijakan publik juga mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan politis, serta menjadi instrumen untuk menjalankan kekuasaan dan dominasi suatu kelompok sosial tertentu.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Menurut Knoefel dalam Prasetyia & Pangestuty (2021), aktor-aktor ini dibagi ke dalam tiga tipe berdasarkan sifat publiknya. Pertama, aktor politik-administrasi, yaitu aktor di bawah otoritas publik yang juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan publik. Kedua, kelompok sasaran, yaitu penerima manfaat akhir dari suatu kebijakan. Kelompok sasaran dapat berupa individu, badan hukum, atau organisasi yang perilakunya diharapkan berubah. Ketiga, kelompok pihak ketiga, yaitu

kelompok yang secara tidak langsung mendapatkan dampak oleh kebijakan yang dibuat aktor politik-administrasi.

Howlett dan Ramesh (2003) menjelaskan lima tahap utama dalam siklus kebijakan publik (*policy cycle*). Tahapan pertama adalah *agenda setting*, yang merupakan tahap pengangkatan isu sosial ke dalam agenda pemerintah untuk ditangani atau ditanggapi. Kedua, *policy formulation*, yakni tahap perumusan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah berdasarkan analisis data, penelitian, atau masukan dari ahli dan aktor terkait. Tahapan selanjutnya yaitu *policy adoption*, di mana pemerintah atau pengambil keputusan memilih salah satu alternatif kebijakan untuk diimplementasikan berdasarkan pertimbangan teknis dan politis. Tahapan keempat adalah *policy implementation*, yaitu pelaksanaan kebijakan melalui tindakan administratif dan operasional. Tahapan terakhir yakni *policy evaluation*, dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan.

Di sisi lain, Dunn (2020) menjelaskan lima prosedur analisis kebijakan yang mana berkaitan erat dengan *policy cycle*. Pertama adalah *defining the problem*, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Selanjutnya, *forecasting*, yang mana di sini informasi mengenai dampak atau konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan (termasuk tidak melakukan sesuatu) dihasilkan. Prosedur ketiga adalah *recommendation*, yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kebermanfaatan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah. Prosedur keempat yaitu *monitoring*, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Kelima, *evaluation*, merupakan tahapan yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Kelima prosedur tersebut berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara berbagai metode dan teknik analisis kebijakan. Dengan kata lain, kelima prosedur analisis kebijakan didukung oleh berbagai metode dan teknik yang berguna untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan.

Proses analisis kebijakan menurut Weimer dan Vining (2017) mencakup serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan. Model ini memfokuskan pada langkah-langkah logis yang dapat membantu menganalisis permasalahan kebijakan dan memberikan solusi optimal. Proses tersebut dimulai dari yang pertama, yakni analisis masalah. Dalam tahapan ini dilakukan serangkaian tindakan untuk memahami masalah publik yang terjadi, menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang akan disusun, dan memilih metode untuk mengatasi masalah. Proses kedua adalah analisis solusi, yang mana meliputi menentukan kriteria untuk memilih alternatif kebijakan, menetapkan alternatif kebijakan sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang ada, mengevaluasi alternatif kebijakan untuk

mengetahui dampak dari setiap alternatif yang dipilih, dan merekomendasikan aksi dan strategi untuk implementasi kebijakan.

Dalam analisis kebijakan publik, terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda (Winarno, 2007). Dengan demikian, analisis kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini. Selain itu, analisis kebijakan publik akan sangat bermanfaat dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik di masa yang akan datang.

Untuk menunjang seluruh proses analisis kebijakan, pemilihan desain penelitian yang tepat menjadi krusial, karena desain penelitian menentukan sejauh mana sebuah studi dapat menghasilkan pemahaman yang valid, mendalam, dan aplikatif terhadap isu kebijakan yang dikaji. Dalam konteks ini, desain penelitian studi kasus menjadi sangat relevan karena mampu menangkap kompleksitas kebijakan publik dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara holistik dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi kebijakan, serta memungkinkan integrasi berbagai sumber data secara simultan. Dengan pendekatan ini, studi kasus tidak hanya memberikan pemahaman kontekstual yang kaya, tetapi juga menghasilkan bukti empiris yang dapat digunakan untuk evaluasi maupun pengembangan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, studi kasus merupakan pendekatan yang strategis untuk mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dalam proses pengambilan keputusan publik.

### Studi Kasus untuk Analisis Kebijakan Publik

Membahas analisis kebijakan berarti membicarakan proses penyediaan solusi yang relevan bagi para pengambil keputusan untuk bertindak secara strategis dan efektif (May & Wildavsky dalam Pal, 2005). Dengan bahasa yang lebih sederhana, analisis kebijakan mencoba untuk membantu memecahkan masalah-masalah publik di masa sekarang. Persoalan-persoalan publik di dunia nyata bersifat kompleks dan melibatkan beragam aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, sehingga dibutuhkan metode analisis yang relevan dan kontekstual untuk menghasilkan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, analisis kebijakan mengacu pada teori dan penelitian ilmu sosial dalam upayanya untuk membantu mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah kebijakan yang ada (Pal, 2005). Namun, sejauh ini ilmu sosial belum berhasil menghasilkan teori umum yang tidak

bergantung pada konteks (Flyvbjerg, 2006). Oleh karena itu, pada akhirnya tidak ada hal lain yang dapat ditawarkan selain pengetahuan yang konkret dan bergantung pada konteks, dan studi kasus sangat cocok untuk menghasilkan pengetahuan semacam ini.

Studi kasus menjadi penting bagi pengembangan pandangan yang bernuansa tentang realitas sosial, termasuk studi tentang masalah sosial. Flyvbjerg (2006) menegaskan bahwa teori-teori prediktif dan universal tidak dapat ditemukan dalam studi tentang masalah sosial sehingga pengetahuan yang konkret dan bergantung pada konteks lebih berharga daripada pencarian yang sia-sia akan teori-teori prediktif dan universal. Selain itu, desain penelitian studi kasus juga memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dalam pengaturan kebijakan publik dan memberikan refleksi pengalaman manusia (Stake; Deem dalam Macpherson et al., 2010).

Desain penelitian studi kasus memberikan kontribusi terhadap analisis kebijakan dalam dua cara. Pertama, desain penelitian ini menyediakan sarana untuk mendefinisikan masalah secara kontekstual. Studi yang telah dilakukan Glette & Wiig (2022), Sibbald et al (2021), Mishra & Dey (2020), Sirous (2024), dan Sabono, et al (2024) telah membuktikan bahwa studi kasus dapat menyediakan pemahaman holistik dan kontekstual terhadap kajian di berbagai bidang, mulai dari sosial, kesehatan, manajemen, hingga tata ruang, yang sangat dibutuhkan dalam analisis kebijakan yang cakupannya meliputi multidisipliner ilmu. Kedua, studi kasus dapat menjelaskan secara mendalam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak bisa dijawab oleh beberapa metode lain, dan pada akhirnya dapat memberikan saran yang lebih aplikatif untuk kebijakan di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan karakteristik penelitian studi kasus yang lebih condong kepada *data-driven* daripada *theory-driven* sehingga tidak sekadar menjawab “apa”, tapi juga “bagaimana” dan “mengapa” (Mishra & Dey, 2020).

Dalam kaitannya dengan analisis kebijakan, desain penelitian studi kasus dapat diterapkan dalam seluruh proses analisis kebijakan, baik analisis masalah maupun analisis solusi. Dalam analisis masalah kebijakan, desain penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi karena dapat memberikan wawasan kontekstual, mendalam, dan praktis mengenai isu yang sedang diteliti. Karena masalah publik tidak bisa dianalisis secara terpisah dari lingkungan dan konteksnya, studi kasus memungkinkan peneliti memahami bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya masalah dan penyebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan sebelumnya yang diperoleh melalui evaluasi kebijakan. Pada dasarnya evaluasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan yang spesifik, lebih teknis, lebih bersifat terapan, dan orientasinya mengarah pada analisis yang fokus terhadap satu program atau kebijakan (Weiss dalam Pal, 2005).

Studi kasus juga memiliki tempat tersendiri dalam penelitian evaluasi. Terdapat empat aplikasi studi kasus dalam penelitian evaluasi, antara lain: pertama, menjelaskan keterkaitan kausal dalam intervensi kehidupan nyata yang terlalu kompleks bagi strategi survei ataupun eksperimen;

kedua, mendeskripsikan konteks kehidupan nyata di mana intervensi terjadi; ketiga, memberikan deskripsi tentang intervensi itu sendiri; dan keempat, digunakan untuk mengeksplorasi situasi-situasi di mana intervensi yang akan dievaluasi tidak memiliki struktur hasil yang tunggal dan jelas (Yin, 2018).

Masalah kebijakan juga sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan, tujuan yang bertentangan, dan kondisi yang dinamis. Studi kasus memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas ini secara holistik. Menentukan masalah dengan benar, dalam hal ini yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para aktor yang terlibat, merupakan sesuatu yang penting dalam membangun dukungan dan mengembangkan kebijakan yang efektif mengingat kebijakan publik sebagai suatu proses politik yang secara inheren melibatkan pengungkapan ide, wacana, dan bahasa. Dari perspektif politis, semua kebijakan publik memiliki “makna” bagi setiap aktor, bukan hanya sekedar mencari solusi teknis atas suatu masalah. “Makna” tersebut hanya bisa diungkap dengan pendekatan yang holistik dan berfokus lebih mendalam pada unit analisis seperti yang dimiliki oleh studi kasus (Pal, 2005).

Mengatasi masalah publik merupakan alasan mengapa kebijakan publik dibuat. Dalam hal pemilihan alternatif kebijakan sebagai bagian dari proses analisis solusi, studi kasus memungkinkan para peneliti untuk menemukan serangkaian keputusan yang kompleks dan dampak dari keputusan-keputusan tersebut. Selain itu, selama proses kebijakan dibuat dalam suatu organisasi, penelitian studi kasus memungkinkan analisis yang lebih berwarna terhadap karakteristik dari organisasi tersebut dan pengambilan keputusan yang terjadi di dalamnya (Sjoberg et al. dalam Pal, 2005). Dengan kata lain, melalui pendekatan yang mendalam, studi kasus dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas kebijakan publik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dibalik kelebihan studi kasus dalam mengungkap masalah publik dan merumuskan solusi yang tepat, masih terdapat pandangan bahwa studi kasus kurang memberikan kontribusi langsung pada pembuatan kebijakan karena keterbatasannya dalam generalisasi dan tingginya potensi bias (Gomm et al., 2011; Yin, 2018). Generalisasi hasil penelitian dalam kebijakan publik adalah suatu proses penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diaplikasikan secara lebih luas dan relevan di berbagai konteks atau situasi. Generalisasi ini membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kebijakan yang dirancang. Namun, pandangan “tanpa sampel yang proporsional dari suatu populasi, tidak ada dasar ilmiah untuk melakukan generalisasi di luar kasus”, dijawab oleh Kennedy (dalam Stoecker, 1991) bahwa generalisasi tidak hanya bergantung pada jumlah unit yang diamati tetapi juga pada jenis unit yang diamati. Dengan demikian, generalisasi berlaku lebih akurat pada situasi yang serupa dan bergantung pada penggunaan informasi *longitudinal*, perbandingan penjelasan yang saling

bersaing, dan deskripsi yang tepat. Analisis statistik memang dapat menjelaskan berbagai hubungan, tetapi hanya penelitian yang cermat dan spesifik yang benar-benar menunjukkan historis proses kausal sehingga dapat memberikan gambaran terbaik. Artinya, studi kasus dapat dikatakan lebih baik dalam menjelaskan hubungan sebab akibat dibandingkan penelitian kuantitatif *cross-sectional* (Stoecker, 1991).

Sebagaimana konsep generalisasi analitis yang disampaikan oleh Yin (2018), seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika beberapa kasus mendukung teori yang sama, maka dimungkinkan untuk menyarankan adanya logika replikasi. Agar mampu bertahan terhadap tantangan analisis logis, generalisasi analitis membutuhkan konstruksi kasus yang sangat kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan dasar pemikiran teoritis pada awal studi kasus tanpa harus benar - benar spesifik terhadap kebijakan publik yang dianalisis. Dengan kata lain, pada awal studi kasus perlu untuk tetap berada pada tingkat konseptual yang relatif tinggi, setidaknya lebih tinggi dari kebijakan yang diteliti. Hasil empiris dari studi kasus harus menunjukkan bagaimana hasil tersebut sesuai atau tidak dengan argumen teoritis di awal dan perlu didiskusikan bagaimana pemikiran teoritis yang didasarkan pada kebijakan khusus ini dapat diterapkan pada situasi dan kebijakan lain dalam studi kasus tertentu.

Jika peneliti kasus telah mengembangkan dan menguji model hubungan yang dihipotesiskan, maka peneliti kasus di masa depan dapat mereplikasi studi kasus awal hanya dengan memilih kasus berdasarkan teori yang sama, kemudian menguji teori-teori tersebut melalui pencocokan pola (Garson, 2018). Jika pencocokan pola gagal untuk menegakkan teori-teori yang didukung oleh peneliti kasus pertama, peneliti kasus kedua dapat terlibat dalam pembangunan penjelasan untuk mengajukan model baru. Hal tersebut sejalan dengan teori “falsifikasi” Popper dalam Flyvbjerg (2006). Jika ditemukan satu kondisi saja yang terbukti tidak sejalan dengan hipotesis awal, maka hal tersebut dapat membatalkan keseluruhan hipotesis. Misalnya, dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan dilakukan studi kasus dengan mengukur beberapa aspek. Jika hasil pengamatan menunjukkan kebijakan tidak bekerja dengan baik pada salah satu aspek saja, maka bisa disimpulkan kebijakan tersebut belum berhasil dan perlu ditinjau kembali. Cara lain untuk memperbesar kemungkinan generalisasi kasus adalah dengan melakukan penelitian pada lebih dari satu kasus. Kekuatan dari studi kasus berganda adalah bahwa generalisasi analitis ini diperkuat ketika hasil dari satu kasus serupa dengan hasil dari kasus-kasus lainnya.

Analisis kebijakan publik dituntut untuk menggunakan metodologi ilmiah dalam prosesnya karena sangat berpengaruh pada *output* yang akan dihasilkan. Metodologi ilmiah dalam analisis kebijakan akan memberikan data yang valid dan dapat diandalkan sehingga membantu pembuat kebijakan memahami masalah yang ingin diselesaikan secara komprehensif dan objektif. Objektivitas merupakan sesuatu yang melekat dalam pertimbangan teknokratis pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi berbagai opsi kebijakan, termasuk potensi manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap

berbagai kelompok masyarakat. Namun sayangnya, sisi objektivitas dalam desain penelitian studi kasus sering kali dipandang sebelah mata. Seperti pembahasan dalam bab sebelumnya, studi kasus sering dikritik karena rentan terhadap bias subyektif. Ancaman bias dalam penelitian studi kasus sebenarnya secara alamiah dapat dikendalikan dengan kekuatan utama studi kasus, yakni fleksibilitas. Bromley menganjurkan triangulasi (penggunaan beberapa metode) untuk menopang validitas internal (Stoecker, 1991). Triangulasi dalam studi kasus, menurut Sibbald et al (2021), akan menghasilkan temuan penelitian dengan validitas yang tinggi. Di sisi lain, Becker, Skocpol, George, dan Platt dalam Stoecker (1991). menganjurkan kontrol validitas internal dengan perbandingan kasus, meskipun hanya beberapa kasus, daripada studi kasus tunggal.

Tabel 1. Bentuk - Bentuk Pemilihan Sampel dan Kasus

Jenis Seleksi	Tujuan
A. Pemilihan secara acak	Untuk menghindari bias sistematis dalam sampel. Ukuran sampel menentukan generalisasi.
1. Sampel acak	Untuk mendapatkan sampel representatif yang memungkinkan generalisasi untuk seluruh populasi.
2. Sampel bertingkat	Untuk generalisasi sub kelompok yang dipilih secara khusus di dalam populasi.
B. Pemilihan yang berorientasi pada informasi	Untuk memaksimalkan kegunaan informasi dari sampel kecil dan kasus tunggal. Kasus dipilih berdasarkan ekspektasi tentang kandungan informasinya.
1. Kasus-kasus yang ekstrem / menyimpang	Untuk mendapatkan informasi tentang kasus - kasus yang tidak biasa, yang bisa jadi sangat bermasalah atau sangat baik.
2. Kasus variasi maksimum	Untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya berbagai keadaan terhadap proses dan hasil kasus (misalnya, tiga sampai empat kasus yang sangat berbeda dalam satu dimensi: ukuran, bentuk organisasi, lokasi, dan anggaran).
3. Kasus - kasus kritis	Untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan kesimpulan logis dari jenis, "Jika ini (tidak) berlaku untuk kasus ini, maka ini (tidak) berlaku untuk semua kasus."
4. Kasus - kasus paradigmatis	Untuk mengembangkan metafora atau membuat pelajaran untuk domain yang menjadi perhatian kasus tersebut.

Sumber: Flyvbjerg (2006)

Sedangkan potensi bias seleksi yang pada akhirnya akan berdampak pada generalisasi dapat ditingkatkan dengan pemilihan kasus yang strategis (Ragin & Rosch dalam Flyvbjerg, 2006). Misalnya, ketika tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah atau fenomena publik tertentu, kasus yang representatif atau sampel acak bukanlah strategi yang paling tepat. Hal ini dikarenakan kasus yang umum atau rata-rata sering kali tidak memberikan informasi yang rinci. Sebaliknya, kasus yang tidak lazim atau ekstrem sering kali mengungkap lebih banyak informasi karena kompleksitas dan keunikan kasus tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Yin (2018), studi kasus yang baik adalah studi kasus yang signifikan dalam arti "tidak biasa dan menarik" dan/atau memberikan contoh isu-isu yang strategis secara nasional, baik secara teoritis dalam hal kebijakan maupun secara praktis (Pal, 2005). Selain itu, baik dari perspektif yang

berorientasi pada pemahaman maupun tindakan, sering kali lebih penting untuk mengklarifikasi penyebab yang lebih dalam di balik suatu masalah dan konsekuensinya daripada menggambarkan gejala-gejala masalah dan seberapa sering masalah tersebut terjadi (Flyvbjerg, 2006). Sedangkan sampel acak yang menekankan keterwakilan jarang sekali dapat menghasilkan pemahaman semacam ini. Untuk memudahkan pemilihan strategi pengambilan sampel, Flyvbjerg (2006) telah merangkum bentuk-bentuk pengambilan sampel sebagaimana tersaji dalam tabel 1.

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra, faktanya, studi kasus sering kali digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau program, mengidentifikasi praktik terbaik guna memberikan rekomendasi kebijakan, dan memahami tantangan yang dihadapi sebuah kebijakan. Kekuatan utama dari studi kasus adalah kemampuannya untuk menggabungkan karakteristik unik dari setiap kasus dan untuk meneliti fenomena yang kompleks dalam konteksnya, yaitu dalam kondisi kehidupan nyata (Stiles dalam Revillard, 2022). Dalam penerapan desain penelitian ini, Yin (2018) mengusulkan untuk mempelajari kualitas studi kasus dalam empat dimensi. Dimensi pertama, validitas konstruk untuk mengkaji kebijakan yang dimaksud dengan menggunakan berbagai sumber bukti, menggambarkan dan membangun rantai sebab akibat, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam validasi protokol dan laporan. Dimensi kedua, validitas internal untuk membangun kepercayaan terhadap hasil penelitian. Langkah - langkah yang perlu dilakukan adalah membandingkan data empiris satu sama lain dan dengan teori, menyusun logika penjabar, memperhitungkan hipotesis yang bersaing dan hipotesis alternatif, serta menggunakan kerangka kerja atau teori intervensi yang logis. Cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan validitas internal dalam penelitian studi kasus kualitatif adalah dengan melakukan analisis data secara sistematis, mulai dari tahapan pengodean, kategorisasi, dan interpretasi tema dan pola (Sirous, 2024). Dimensi ketiga, validitas eksternal yang berkaitan dengan kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Yin (2018) menjelaskan bahwa validitas eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan teori dan menggunakan logika replikasi analitis. Dimensi keempat yaitu keandalan (*reliability*) yang berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat direplikasikan pada kasus yang sama atau temuan yang sama. Langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah menggunakan protokol studi kebijakan dan mengembangkan basis data kasus.

Peneliti juga disarankan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih kasus yang representatif, kaya informasi, dan relevan dengan tujuan penelitian (Sirous, 2024). Dalam penelitian studi kasus, pemilihan kasus yang tidak tepat dapat menurunkan kemampuan replikasi hasil penelitian. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dimungkinkan untuk menggabungkan studi kasus (yang mungkin berfokus pada analisis proses, misalnya) dengan strategi penelitian lain yang saling melengkapi, seperti pendekatan kuasi-eksperimen (Yin, 2018).

## Kesimpulan

Desain penelitian studi kasus merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk analisis kebijakan, terutama untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks spesifik. Kaitannya dengan analisis kebijakan, studi kasus memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pendekatan lain, seperti fleksibel terhadap berbagai metode pengumpulan data dan kemampuannya mendefinisikan masalah secara konkret, kontekstual, dan mendalam. Oleh karena itu, studi kasus diklaim lebih unggul dalam mengungkap makna dan menganalisis sebab-akibat suatu peristiwa atau kebijakan. Selain itu, kemampuannya dalam mengolaborasikan karakteristik unik dari setiap kasus dan meneliti fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, membuatnya dapat menemukan serangkaian keputusan yang kompleks sehingga akan sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang efektif, efisien, dan aplikatif. Studi kasus juga relevan untuk diterapkan dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik dalam analisis masalah maupun analisis solusi.

Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, seorang peneliti atau analis kebijakan perlu tetap menjadikan kritikan terhadap desain penelitian ini sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi. Berkaitan dengan masalah generalisasi misalnya, pada awal penelitian, perlu ditentukan dasar pemikiran teoritis yang lebih umum dibandingkan dengan kebijakan yang diteliti. Selain itu peneliti atau analis kebijakan bisa menggunakan lebih dari satu kasus untuk memperkuat reliabilitas penelitian. Berikutnya, berkaitan dengan potensi bias subyektif, hal tersebut dapat diatasi dengan triangulasi dan perbandingan kasus. Sementara itu, bias seleksi dapat dimitigasi dengan pemilihan kasus yang strategis, yaitu kasus yang memiliki kesesuaian tinggi dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Dengan mencermati kelebihan, kritikan, dan tantangan dalam penerapannya, desain penelitian studi kasus memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dalam proses analisis kebijakan publik. Namun, hal ini tidak berarti mengesampingkan peran metode lain, khususnya penelitian berbasis analisis statistik. Seorang peneliti atau analis kebijakan tetap disarankan untuk memilih metode yang tepat dalam melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Tidak menutup kemungkinan juga bagi peneliti atau analis kebijakan untuk mengolaborasikan beberapa metode yang berbeda untuk menghasilkan saran kebijakan yang relevan yang mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan publik.

## Daftar Pustaka

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2846813>

- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). *Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches. 4th Edition*, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(100). <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>
- Dunn, W.N. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Wibawa, S., Asitadami, D., Hadna, A.H., Purwanto, E.A., Penerjemah). Gajah Mada University Press.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245. <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>.
- Garson, G.D., (2018). Case Study Research in Public Administration and Public Policy: Standards and Strategies. *Journal of Public Affairs Education*, 8(3), 209-216. <https://doi.org/10.1080/15236803.2002.12023551>.
- Gerring, J. (2017). *Case study research: Principles and practices (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Glette, M. K., & Wiig, S. (2022). The Headaches of Case Study Research: A Discussion of Emerging Challenges and Possible Ways Out of the Pain. *The Qualitative Report*, 27(5), 1377-1392. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5246>.
- Gomm, R., Hammersley, M., & Foster, P. (2011). Case study and generalisation. In R. Gomm, M. Hammersley, & P. Foster (Eds.), *Case study method* (pp. 98–115). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9780857024367.d9>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Hyett, N., Kenny, A., & Dickson-Swift, V. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 9(1), 23606. <https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23606>
- Luck, L., Jackson, D., & Usher, K. (2006). Case Study: A Bridge Across the Paradigm. *Nursing Inquiry* 2006, 13(2), 103–109. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2006.00309.x>.
- Macpherson, I., Brooker, R., & Ainsworth, P. (2010). Case Study in The Contemporary World of Research: Using Notions of Purpose, Place, Process and Product to Develop Some Principles for Practice. *International Journal of Social Research Methodology*, 3 (1), 49-61, <https://doi.org/10.1080/136455700294923>.
- Marshall, C. and Rossman, G. (2016) *Designing Qualitative Research. 6th Edition*, SAGE, Thousand Oaks.

- Mishra, S., & Dey, A. K. (2021). Strategic Shift to Case Study Research. *South Asian Journal of Business and Management Cases*, 9(3), 313-316. <https://doi.org/10.1177/2277977920973179>.
- Pal, L.A. (2005). Case Study Method and Policy Analysis. Dalam: Geva-May, I. (eds) *Thinking Like a Policy Analyst*. [https://doi.org/10.1057/9781403980939\\_12](https://doi.org/10.1057/9781403980939_12).
- Prasetyia, F. & Pangestuty, F.W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Revillard, A. (2022). *Policy Evaluation: Methods and Approaches*. Laboratory for Interdisciplinary Evaluation of Public Policies.
- Sabono, F., Widiastuti, I., & Sudradjat, I. (2024). Potential Advantages and Disadvantages of Case Study as Methodological Approach in Streetscape Research. *Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning*, 23(2), 1-19. <https://doi.org/10.54028/NJ202423411>.
- Sibbald, S.L., Paciocco, S., Fournie, M., Van Asseldonk, R., Scurr, T. (2021). Continuing to Enhance the Quality of Case Study Methodology in Health Services Research. *Healthcare Management Forum*. 2021, 34(5), 291-296. <https://doi.org/10.1177/08404704211028857>.
- Sirous, B. (2024). Case Study Methodology in Management Research: Applications and Best Practices. *Journal of Research in International Business and Management*, 11(2), 1-2. <http://dx.doi.org/10.14303/jribm.2024.020>.
- Stoecker, R. (1991). Evaluating and Rethinking the Case Study. *The Sociological Review*, 39(1), 88-112. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1991.tb02970.x>.
- Takahashi, A.R.W., & Araujo, L. (2020). Case Study Research: Opening Up Research Opportunities. *RAUSP Management Journal*, 55(1), 100-111. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-05-2019-0109>.
- Thomas, G. (2016). *How to do your case study (2nd ed.)*. Sage.
- Weimer, D.L. & Vining, A.R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Routledge
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Services.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.